

PERSEPSI REZIM IRAN MENGENAI PERANG IRAK—IRAN*

B. WIROGUNO

Pada waktu perang Irak-Iran berlangsung terus dan Irak gagal mencapai kemenangan yang menentukan di medan pertempuran, dimensi ideologi dalam sikap rezim Iran terhadap perang itu dan syarat-syarat untuk mengakhiri peperangan menjadi semakin menyolok. Pemimpin-pemimpin Iran membatasi perang itu dengan pengertian-pengertian dan istilah-istilah abstrak seperti "perang monotheisme melawan atheisme", "perang keadilan melawan pemerkosaan keadilan", atau "perang Islam melawan musuh Islam". Menurut mereka rezim Saddam Hussein adalah personifikasi musuh anti Islam dan likuidasinya menjadi tujuan Republik Islam. Mereka menolak segala kemungkinan penyelesaian dengan rezim Saddam Hussein, dan secara demikian menunda akhir peperangan untuk waktu tak terbatas, sehingga perang tidak akan berakhir dalam waktu dekat ini. Sesuai dengan persepsi peperangan ini dan berpegangan pada kepercayaan bahwa rakyat Iran memiliki daya tahan yang besar, pemimpin-pemimpin Iran berpegang teguh pada syarat-syarat yang berat walaupun dapat diterima untuk mengakhiri peperangan. Bersamaan dengan itu mereka begitu saja menolak setiap gerak politik yang dimaksud untuk mengakhiri peperangan lewat perundingan - termasuk gencatan senjata, biarpun dapat menerima suatu penghentian sementara tembak menembak atau kerja sama dengan para penengah.

Dalam tubuh rezim Iran terdapat bermacam-macam pendapat dan pernyataan-pernyataan anggota-anggotanya tidak ditandai suatu garis seragam dan koheren yang dapat dibatasi sebagai sikap resmi Iran. Orientasi-orientasi keagamaan Islam dan nasional terungkap dalam pernyataan-pernyataan mereka secara campur aduk. Perkembangan di medan pertempuran dan dalam perebutan kekuasaan dalam negeri mempengaruhi sikap-

* Pernah dimuat dalam *Suara Karya*, 7 April 1981

sikap, dan pendekatan ideologi terhadap perang jelas menjurus ke radikalisasi dan mengurangi kemungkinan berakhirnya perang lewat meja perundingan. Walaupun di sana sini muncul petunjuk-petunjuk adanya kesediaan untuk kompromi atau perundingan, trend dominan di Iran kini adalah trend penolakan yang tegas. Menurut para pemimpin Iran, perang dengan Irak seperti berlangsung sejauh ini dapat berlangsung terus untuk waktu lama dan dalam kenyataan memperkuat Revolusi Islam. Selama peperangan mengikuti pola sekarang ini, dan tidak terjadi pergantian pemerintah atau perubahan dalam negara, trend itu kiranya akan berlangsung terus.

CIRI-CIRI POSISI DASAR IRAN

Pada waktu Irak menyerbu Iran, pemimpin-pemimpin Iran tidak siap untuk konfrontasi serupa itu, baik dalam arti militer strategis maupun dalam arti ideologi. Mereka berusaha untuk menjembatani jurang kredibilitas yang lebar antara pretensi-pretensi muluk mereka dan suatu kenyataan yang mengandung kemungkinan lenyapnya eksistensi Republik Islam Iran. Dengan demikian *ofensif Irak itu dengan tajam menyoroti adanya kontradiksi antara nasionalisme Iran dan konsep Islam rejim Khomeini* (Pan Islam). Pada intinya konsep ini mengecam nasionalisme sebagai buah busuk kolonialisme Barat dan menyerukan persatuan Dunia Islam. Secara demikian pandangan pemimpin-pemimpin Iran mengenai perang itu diwarnai dua pandangan yang berlainan: pandangan keagamaan Islam dan pandangan nasionalis. Berbagai jurubicara dari waktu ke waktu mewakili pandangan yang satu atau yang lain, dan walaupun bertolak belakang satu sama lain kedua pandangan itu sering disuarakan oleh jurubicara yang sama. Khomeini sendiri membatasi perang sebagai "perang monotheisme melawan atheisme". Dalam pidatonya kepada pasukan-pasukan pada 21 Oktober 1980, Presiden Bani Sadr berkata: "Dalam Islam orang berperang untuk Allah dan oleh sebab itu tidak boleh ada konsesi sampai kemenangan akhir. Dengan demikian kata kekalahan tidak mempunyai arti. Muhammad berperang selama 12 tahun dan menghadapi hambatan-hambatan sampai kemenangan akhir Islam." Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Udara Islam, Javad Fakuri, melukiskan perang sebagai suatu pertarungan bukan antara dua tentara tetapi antara dua sistem: "yang satu bekerja untuk memajukan dan memperluas Islam dan yang lain untuk memblokir dan mencegah proses itu". Ungkapan sikap dengan mana pemimpin-pemimpin Iran berusaha meresapi rakyat diberikan oleh *Teheran Times*, 5 Oktober 1980, yang melukiskan perang Irak dan Iran sebagai "suatu perang keadilan lawan pemerkosaan keadilan". Bani Sadr *berusaha mempertemukan kontradiksi antara Pan Islam dan nasionalisme itu* ketika menyatakan pada pertengahan Oktober 1980: "Kita bertempur untuk negara dan iman kita; nasionalisme adalah bagian iman Islam kita."

Dua hal yang juga menjadi ciri posisi dasar Iran mengenai perang itu perlu dicatat. Pertama, dalam menyebutkan Irak pemimpin-pemimpin Iran jelas *membedakan Saddam Hussein beserta rezimnya dan rakyat Irak*. Sedangkan Rezim Baath, yang menantang Revolusi Islam, secara berangsur-angsur dijadikan sasaran kebencian dan serangan-serangan rezim Iran, rakyat Irak dilihat secara positif dan Khomeini berseru kepada mereka untuk memberontak melawan para penguasa mereka. Lukisan Saddam Hussein dan rejimnya sebagai anti Islam setiap kali muncul dalam pernyataan-pernyataan pemimpin-pemimpin Iran, dan oleh sebab itu harus dilancarkan Jihad terhadapnya. Untuk mengobarkan kembali semangat revolusioner rakyat yang menurun, harian Iran *Al Talaat* menggambarkan *rezim Saddam Hussein sebagai suatu rezim setan seperti rezim Shah*, dan oleh sebab itu ditolak sebagai sesuatu yang keji. Lebih dari satu kali pemimpin-pemimpin Iran menuntut agar Saddam Hussein diajukan ke depan sebuah mahkamah internasional untuk kejahatan-kejahatannya terhadap Iran.

Kedua, sambil menolak klaim Irak bahwa perang adalah antara bangsa Arab dan bangsa Parsi, pemimpin-pemimpin Iran dengan pedas *menyerang Partai Baath*. Dalam suatu karangan dalam harian *Inkilab-i-Islami*, 19 Oktober 1980 ditonjolkan bahwa Partai Baath didirikan oleh seorang kristen, Michel Aflaq; juga disebutkan dengan ejekan slogan-slogan Partai Baath yang berasal dari masa terbentuknya yang menyerukan persatuan Arab dan Arabisasi kawasan; dan diserukan agar kampanye melawan rezim Saddam Hussein dilakukan dengan semboyan "Jatuhkan Fasisme Baath".

CIRI-CIRI POSISI POLITIK IRAN

Dalam "perimbangan kelemahan" di mana Iran dan Irak kini berada di medan perang, kebiasaan pemimpin-pemimpin Iran untuk menyebutkan perang itu sebagai perang keadilan lawan perkosaan keadilan, monotheisme lawan atheisme, dan Islam lawan anti Islam, pada hakekatnya *memperkecil prospek Iran bersedia mengakhiri perang lewat perundingan dan menjurus pada syarat-syarat yang berat untuk mengakhiri pertempuran*. Dalam penolakan gagasan untuk mengadakan perundingan perdamaian dengan Irak, pada 25 September 1980 Khomeini mengatakan bahwa kemenangan dan kekalahan mempunyai suatu kriterium yang tidak berkaitan dengan hasil perang; mereka yang bertempur untuk Allah adalah pemenang dan mereka yang bertempur untuk setan menderita kekalahan. Karena -menurut dia- Iran adalah "wakil Allah di dunia", dia adalah pemenang dan tidak akan menyerah kalah bahkan kalau dia mengalami boikot ekonomi langsung maupun tak langsung dan invasi militer. Pada akhir Oktober Khomeini

mengatakan bahwa tidak ada gunanya berunding dengan Irak, sambil menandakan bahwa Islam tidak bisa berdamai dengan musuh Islam. Selain itu dia mengatakan bahwa *seperti tiada kemungkinan kompromi dengan Shah juga tiada kemungkinan kompromi dengan Saddam Hussein*. Sebagai tambahan, Ketua Majelis Rafsanjani menyatakan bahwa perang akan berlangsung terus sampai rezim Saddam Hussein jatuh. Presiden Bani Sadr mengatakan pada 19 Nopember 1980 bahwa kemenangan mutlak berarti digulingkannya rezim Saddam Hussein dan bahwa dicapainya sasaran itu lebih baik daripada kemenangan militer di medan pertempuran.

Sesuai dengan persepsi mereka bahwa kemenangan adalah digulingkannya rezim Saddam Hussein, pemimpin-pemimpin Iran mengajukan syarat-syarat perdamaian kepada Irak yang sulit dan bahkan tidak dapat diterima. Pertama, Khomeini *mengaitkan perubahan dalam posisi Iran dengan perubahan-perubahan dalam negeri Irak*, yaitu "hanya kalau Saddam Hussein mengundurkan diri dan menyatakan telah menjadi Muslim" dapat ada perdamaian dengan Irak.

Kedua, Ayatullah Ulama Yahya Nuri, salah satu pendukung Bani Sadr, dalam suatu wawancara dengan *Teheran Times*, 6 Oktober 1980, berseru kepada Irak agar *mengembalikan semua wilayah Iran kepada Iran*. Menurut dia semua buku geografi dan sejarah Islam membuktikan bahwa wilayah-wilayah Heere, Anbar, Medayen, Tesfoon, di mana kini terletak Bagdad, Mosul, Khanaqin dan Basra, dahulu adalah propinsi-propinsi Iran. Wilayah-wilayah itu adalah bagian integral Iran bahkan sebelum kedatangan Islam, dan menurut Nuri diterimanya Islam tidak dapat mengubah geografi atau hak-hak nasional. Oleh sebab itu keempat kota tersebut di atas masuk Iran, seperti halnya dengan ketiga pulau di Teluk.

Ketiga, sebagai syarat setiap perundingan, jurubicara-jurubicara Iran menuntut *penarikan semua pasukan Irak* dari wilayah Iran yang diserbu sejak 22 September 1980. Ali Shams Ardakani, utusan Bani Sadr ke Majelis Umum PBB, menyatakan di situ pada 14 Oktober 1980 bahwa negaranya tidak akan menyetujui gencatan senjata dan tidak akan mengadakan perundingan dengan Irak sampai negara ini menarik pasukan-pasukannya dari Iran. Ayatullah Beheshti juga menyatakan pada 15 Oktober 1980 bahwa perdamaian maupun kompromi dengan Irak tidak akan mungkin sampai penarikan semua pasukan Irak. Akhirnya PM Rajai mengatakan pada pertengahan Nopember 1980 bahwa tidak mungkin diadakan perundingan dengan Irak, bahkan kalau Irak menarik pasukan-pasukannya.

Di tingkat praktis dan kurang resmi kadang-kadang terungkap suatu posisi yang sedikit lebih luwes. Pertama, dalam suatu surat yang dikirimkan ke

Kedutaan Besar Irak di Teheran dan kepada Menteri Luar Negeri Irak, dan disebarluaskan sebagai lampiran suatu kertas kerja Dewan Keamanan pada 17 September 1980, sebagai tanggapan atas pembatalan persetujuan 1975 secara sepihak oleh Irak, Pemerintah Irak dituduh merugikan keamanan dalam negeri Iran dengan melanggar protokol yang termasuk persetujuan 1975 itu sehubungan dengan keamanan perbatasan bersama kedua negara. Dalam bagian kedua surat itu Iran mengatakan dengan nada moderat dan konsiliatoris bahwa "andaikata dari sudut pandangan Pemerintah Irak terdapat kesulitan-kesulitan sehubungan dengan penerapan dan penafsiran perjanjian itu dan persetujuan-persetujuan di dalamnya, seyogyanya diambil langkah-langkah sesuai dengan pasal 6 perjanjian dan lampiran 26 Desember 1975, di mana prosedur bagi penyelesaian sengketa-sengketa jelas digariskan...." Keluhan-keluhan serupa mengenai kegagalan mematuhi persetujuan 1975 juga dibuat oleh PM Rajai dalam wawancara dengan harian Libanon *Al Safir*, 8 Nopember 1980. Penggunaan istilah-istilah yang berlaku dalam hukum internasional dalam suatu dokumen resmi Iran, khususnya bila oleh seorang wakil kelompok radikal golongan agama, memberikan kesan keluwesan dan pragmatisme, dibandingkan dengan posisi tak kenal kompromi yang diambil oleh Khomeini dan lain-lain pemimpin.

Penyimpangan lain dari sikap tak kenal kompromi Iran yang menimbulkan kesan adanya kemungkinan kompromi juga terungkap dalam kata-kata Bani Sadr dalam suatu wawancara pada 11 Oktober 1980, ketika dia menyatakan bahwa sekalipun soal Shatt-al-Arab bukan bahan perundingan dengan Irak, *tuntutan penyesuaian perbatasan di sektor utara dapat dibicarakan*. Demikianpun komentar PM Rajai kepada Menlu India. Biarpun ini dimaksud sebagai suatu konsesi, perlu dicatat bahwa *menurut perjanjian 1975 suatu daerah perbatasan dekat Qasr Shirin harus diserahkan kepada keaualatan Irak*, tetapi Iran tidak menghormati ketentuan ini dan perbatasan di sektor itu tetap tidak jelas. Juga seruan dalam perjanjian untuk membentuk suatu komisi yang akan menetapkan perbatasan permanen belum ditanggapi. Dengan demikian pernyataan-pernyataan di atas itu tidak banyak menyimpang dari pernyataan-pernyataan lain-lain pemimpin yang mematuhi perjanjian 1975 sebagai suatu dokumen yang mengikat. Cara rezim sekarang ini berpegang pada perjanjian 1975, yang ditandatangani di waktu Shah oleh wakil-wakil pemerintahnya, memberikan suatu tekanan ironis kepada kenyataan bahwa komponen nasionalis politik luar negeri Iran - yang menonjol di bawah Shah - sama sekali tidak lenyap dengan dibentuknya Republik Islam dan tetap penting bagi pemimpin-pemimpin sekarang ini.

Suatu penyimpangan yang jelas dari garis resmi pada 20 Nopember 1980 didengar dari PM Rajai itu sendiri, ketika menyusul pembicaraannya dengan utusan Sekjen PBB Palme, dia menyatakan *bersedia menerima suatu gencatan*

senjata segera setelah pasukan-pasukan Irak mulai ditarik mundur dari wilayah Iran. Akan tetapi terlalu pagi untuk mengetahui apakah kata-kata Rajai itu mengisyaratkan awal perlunakan sikap Khomeini atau merupakan retaknya konsensus mengenai soal gencatan senjata. Konsep perang pemimpin-pemimpin Iran mengandung penolakan gencatan senjata. Pernyataan-pernyataan Rajai sejak pecahnya perang, termasuk pidatonya di Dewan Keamanan PBB pada 18 Nopember 1980 dan pembicaraannya dengan utusan PM Indira Ghandi pada 2 Nopember 1980, jelas menunjukkan bahwa menurut dia setiap persetujuan gencatan senjata Iran akan berarti menerima situasi yang ada, yaitu kehadiran pasukan-pasukan Irak di bumi Iran, yang sama sekali tidak dapat diterima oleh Iran. Perlu dicatat bahwa para pendukung Rajai, yang kini menguasai Departemen Luar Negeri Iran jelas bertanggung jawab untuk penerbitan komunike 4 Nopember 1980, yang sama sekali menolak segala usaha untuk mencapai gencatan senjata dengan alasan bahwa hal itu tidak akan membantu Iran dan tidak mempunyai arti sedikitpun bagi negara itu.

Sejak pecahnya perang berbagai lembaga internasional dan orang menawarkan jasa-jasa mereka sebagai perantara Irak dan Iran dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa mereka. Teheran tidak menutup pintu bagi para penengah, tetapi sejauh ini segala usaha penengahan gagal. Di antara mereka yang secara sia-sia berusaha sebagai penengah adalah Zia ul-Haq, Habib Shatti, utusan senior dari India, Kuba, Yugoslavia dan kemudian juga wakil Sekjen PBB, Olaf Palme. Biarpun Olaf Palme mengatakan berhasil mendapat sepakat kata Irak dan Iran untuk membebaskan kapal-kapal yang terjebak di Shatt-al-Arab, itu bukan soal baru di pihak Iran karena Bani Sadr sebelumnya telah mengumumkan kesediaan Iran untuk mengadakan gencatan senjata sementara (*truce*) untuk memungkinkan kapal-kapal yang terjebak dibebaskan. Gagasan dasar mengenai berbagai usaha penengahan itu dimuat dalam komunike Kementerian Luar Negeri 4 Nopember 1980, yang menyebutkan bahwa berbagai utusan itu dikirim untuk *mengumpulkan informasi dan bukan untuk menjadi penengah*, dan menasehatkan mereka untuk pergi ke daerah-daerah pertempuran untuk mengetahui sendiri besarnya kejahatan yang dilakukan Rezim Baath. Tetapi pada prinsipnya Bani Sadr tidak menolak kerja sama dengan para penengah khususnya PBB. Penunjukan Ali Shams Ardakani, seorang pendukung Bani Sadr, sebagai utusan khusus ke PBB bulan Oktober 1980, pada waktu itu diartikan sebagai suatu usaha untuk ke luar dari isolasi internasional yang menimpa Iran sejak revolusi. Tetapi kedatangan mendadak Rajai di Majelis Umum, jelas tanpa memberitahukan maksudnya lebih dahulu kepada Bani Sadr, menggagalkan usaha itu. Persetujuan Iran dengan kedatangan Olaf Palme sebagai utusan Sekjen PBB juga sesuai dengan arti yang diberikan kepada PBB oleh sementara pemimpin Iran, bahkan kalau untuk sementara hasil misinya tidak banyak berbeda dengan

hasil penengah-penengah lain. Ungkapan sikap dominan pemimpin-pemimpin Iran terhadap para penengah disuarakan oleh Rajai pada kunjungan Palme, ketika dia membatasi berbagai usaha penengahan itu sebagai *menyia-nyiaakan waktu*.

PENUTUP

Pada waktu perang dengan Irak berlangsung terus dan belum kelihatan hasil yang menentukan, *intransigensi ideologi pemimpin-pemimpin Iran*, di bawah Khomeini, menjadi semakin kuat dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan pandangan mereka mengenai perang itu dan cara untuk mengakhirinya. Trend ini kiranya akan berlangsung terus di masa mendatang ini, karena masuk akallah anggapan bahwa di mata pemimpin-pemimpin Iran hal itu menguntungkan bagi revolusi. Oleh sebab itu diperkirakan bahwa pemimpin-pemimpin seperti Bani Sadr dan mungkin juga Rajai, yang menunjukkan tanda-tanda bersedia untuk melihat kemungkinan mengakhiri peperangan lewat perundingan, akan terpaksa mengikuti garis yang ditetapkan kelompok radikal dalam pimpinan, walaupun hanya untuk tidak membahayakan kedudukan politik mereka. Usaha pemaduan konsep Pan Islam dengan konsep nasionalis Iran dalam pandangan pimpinan Iran mengenai perang, bersama-sama dengan perebutan kekuasaan di antara mereka, mengakibatkan *radikalisasi sikap pemimpin-pemimpin Iran, yang memperkecil kemungkinan segera dimulainya perundingan untuk mengakhiri perang*. Selama situasi di medan tempur tidak berubah, dan selama tiada pergantian rezim di Teheran, garis itu kiranya akan berlangsung terus.